



Pemkot Terima Belasan Aduan soal IMB Hotel

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja menerima belasan aduan dari masyarakat berkaitan dengan izin pembangunan hotel yang terindikasi bermasalah.

Yosef Leon & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

Saat ini terhadap izin tersebut tengah dilakukan pencermatan ulang. Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi, memutuskan untuk mencermati dan mengkaji ulang sejumlah perizinan hotel sejak tersandungnya mantan Wali Kota Jogja,

Haryadi Suyuti, dalam kasus dugaan suap IMB apartemen Royal Kedhaton. "Jumlahnya sekira belasan [aduan]. Itu yang kami cermati yang ada indikasi bermasalah. Pokoknya yang [izin] besar belasan sudah disampaikan

▶ **Pemkot akan mengkaji perizinan hotel yang sifatnya besar saja.**

▶ **Sejumlah organisasi sipil meminta KPK untuk memeriksa ratusan izin hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat.**

dan dicermati," kata Sumadi, Kamis (9/6).

la menyebut tidak semua izin

perhotelan yang dikeluarkan semasa Haryadi menjabat akan diperiksa. Pemkot akan mengkaji perizinan hotel yang sifatnya besar saja. Pemkot juga akan terbuka terhadap aduan dari masyarakat jika mengetahui adanya perizinan hotel yang diduga bermasalah. "Tidak mungkin semua dicermati, yang besar-besar saja dan semua masukan akan kami cermati misalnya soal adanya laporan dari masyarakat atau yang lain. Kira-kira ada yang indikasi bermasalah, akan

kami dalam," ungkapnya. Selain itu, Sumadi akan intens menjalin komunikasi dengan KPK guna memastikan bahwa pendalaman terhadap kasus itu tuntas dilakukan. "Kami juga akan koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta kepada KPK untuk memeriksa ratusan izin hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat.

▶ Halaman 10

Pemkot Terima...

Pemeriksaan itu untuk membuktikan apakah terdapat aturan yang dilanggar maupun gratifikasi seperti pada kasus apartemen Royal Kedhaton.

Aktivitas Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa, menyebut sedikitnya ada sekitar 104-106 izin pembangunan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat sebagai Wali Kota Jogja. Izin itu dikeluarkan sampai pada Desember 2013. Sebab, sejak 2014 sampai 2017 Jogja memberlakukan penyetapan sementara (moratorium) pembangunan hotel.

"KPK harus meninjau ulang ratusan izin hotel itu dengan ditanggapnya HS. Ini adalah awal, pecah telur kasus suap di Jogja ini, sehingga sejak 2012 sampai 2022 masa jabatan HS itu harus ditelusuri lagi izin hotel yang dikeluarkan," ungkapnya dalam jumpa pers korban kebijakan Haryadi Suyuti, di LBH Jogja, Kamis.

Menurut Dodok, dugaan izin hotel yang dikeluarkan itu bermasalah bukan tanpa alasan. Pada 2014 lalu ia pernah memprotes berdirinya sebuah hotel di Kampung Miliran Umbulharjo yang berdampak pada kekeringan sumber air di wilayahnya.

Setelah diperiksa, ternyata hotel tersebut belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah sumur, tetapi sudah beroperasi. "Itu kemudian hanya ditutup sementara, kemudian hotel menggunakan air PDAM. Pertanyaannya PDAM pakai air dari mana? Juga air tanah kan? Makanya hanya memindahkan masalah yang semula dari Miliran kemudian harus ditanggung seluruh Kota Jogja," jelasnya.

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut dugaan suap yang menjerat Haryadi Suyuti

bukan merupakan yang pertama kali diterimanya sebagai kepala daerah. Kuat dugaan, Haryadi telah menerima beberapa kali uang pelicin untuk memuluskan proyek pembangunan di Jogja. "Dalam operasi tangkap tangan [OTT] KPK itu, jarang sekali penerimaan pertama, biasanya itu sudah yang kesekian kalinya," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.

Haryadi sebelumnya ditangkap dalam kasus dugaan suap IMB apartemen Royal Kedhaton pada pekan lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Kepala DPMPITSP Jogja, Nurwidhi; sekretaris pribadinya, Triyanto Budi Yuwono dan Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk, Oon Nushihono.

Menurut Zaenur, tugas KPK tidak boleh berhenti hanya sebatas menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka. Ia mendesak komisi antirasuah mengembangkan kasus itu secara komprehensif untuk mengungkap dugaan adanya tersangka lain.

Jika dalam perjalanan kasus, KPK hanya menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka diduga bahwa ada faktor lain. Oleh karenanya, ia meminta agar pengembangan kasus dilakukan dengan cermat dan menyeluruh.

Di lain hal, KPK pasti telah mempunyai rekaman percakapan atau bukti lain dalam dugaan perkara dugaan suap yang lainnya. "Jangan hanya berhenti di pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kalau berhenti maka diduga kuat barangkali ada faktor nonhukum seperti politik. Jangan sampai bermain politik, selesaikan kasus ini dan kembangkan seperti yang selama ini KPK melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah lainnya," jelasnya.

KPK, lanjut Zaenur harus

melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan perkara seperti yang selama ini dilakukan. Sebab, cukup banyak kasus korupsi yang menjerat kepada daerah yang kemudian dikembangkan KPK dan berhasil mengungkap perkara lain.

Ia memberi contoh dalam kasus yang menjerat eks Bupati Bangkalan Fuad Amin. Dalam perkara itu, KPK berhasil mengungkap berbagai tindakan culas Fuad. "Penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan lewat Tindak Pidana Pencucian Uang [TPPU] untuk melihat sumber penerimaan dan aliran dana dari mana saja dan mengalir ke mana saja," katanya.

Di sisi lain, Zaenur berpendapat bahwa PT Summarecon Tbk juga perlu ditetapkan sebagai tersangka. Musababnya, dugaan suap yang diberikan kepada Haryadi merupakan perbuatan yang sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan itu. "Kalau nanti sudah terbukti bahwa perizinan bisa keluar karena adanya tindak pidana korupsi berupa suap, maka perizinan itu harus dibatalkan sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan tata usaha negara bila di dalam pendirian ada catat prosedur atau substansi, salah satunya karena ada tindak pidana," katanya.

Peneliti IDEA, Ahmad Hedar, mengatakan mencuatnya kasus dugaan suap IMB terhadap Haryadi Suyuti merupakan langkah awal bagi KPK untuk memeriksa sejumlah kasus korupsi di wilayah DIY. Pasalnya, laporan dugaan korupsi kepada KPK untuk wilayah setempat disebut cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. "Dari catatan kami sejak 2015-2018 ada 192 laporan dugaan korupsi kepada KPK di DIY."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005